

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Amirudin, *et al.*, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persara, Jakarta.
- Arstein-Kerslake, Anna, 2017, *Restoring Voice to People with Cognitive Disabilities: Realizing the Right to Equal Recognition Before the Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ashshafa, Burhan 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Beckman, Ludvig, 2009, *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and Its Limits*, Palgrave Macmillan, Hampshire.
- Conte, Alex, *et al.*, 2009, *Defning Civil and Political Rights, The Jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee*, Ashgate Publishing Limited, Surrey.
- Dahl, Robert A., 1989, *Democracy and Its Critics*, Yale University, Virginia
- , 1998, *On Democracy*, Yale University Press, Virginia.
- , 2006, *On Political Equality*, Yale University Press, Virginia.
- Dorsen, Norman, *et al.*, 2003, *Comparative Constitutionalism: Cases and Materials (American Casebook Series)*, West Group, Minnesota.

- Fadjar, Mukthie, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang.
- Fina, Valentina Della, *et al.*, 2017, *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A Commentary*, Springer, Switzerland.
- Gaffar, Janedjri M., 2013, *Demokrasi Konstitusional, Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Haryadi, Achmad Dodi, 2013, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Idries, Abdul Mun'im, *et al.*, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT Gungung Agung, Jakarta.
- International Disability Alliance (IDA), 2013, *Deprivation of Voting Rights Ruled Unconstitutional in Japan*, The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
- International Foundation for Electoral Systems, 2014, *Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*, International Foundation for Electoral Systems, Washington, D.C.
- International IDEA, 2002, *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Ampeero, Jakarta.
- Kana, Nico L., *et al.*, 2006, *Demokrasi dan Potret Pemilu Lokal 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Larry Johnston, 2013, *An Introduction to The Modern Democratic State: Fourth Edition*, University of Toronto Press, Ontario.
- Mardalis, 2006, *Metode Penulisan Hukum: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penulisan Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Maslim, Rusdi, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkasan dari PPDGJ-III dan DSM-5*, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta.
- Ni'Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Nick O' Neil, *et al.*, 2011, *Capacity and Law*, Sydney University Press, Sydney.
- Norris, Pippa, 2014, *Why Electoral Integrity Matters*, Cambridge Press, Cambridge.
- Perlin, Michael L, *et al.*, 2008, *Competence in the Law from Legal Theory to Clinical Application*, 2008, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sales, Bruce Dennis, *et al.*, 1982, *Disabled Persons and the law*, Plenum Press, New York.
- Silkenat, James S., *et al.*, 2014, *The Legal Doctrine of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat)*, Springer International Publishing, Switzerland.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek*, Kencana, Yogyakarta.

The Carter Center, 2014, *Election Obligations and Standards: A Carter Center Assessment Manual*, One Coppenhill, Atlanta.

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Pinasthika Prasmadhani R., 2005, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Negara Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

ARTIKEL JURNAL

Cary Coglianse, "Review: Democracy and Its Critics by Robert A. Dahl", *Michigan Law Review*, Vol. 88, No. 6, 1990.

Hurst Hannum, 'The UDHR in National and International Law', *Health and Human Rights*, Vol. 3, No. 2, 1998.

Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti "Aksesibilitas Pemilihan Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas", *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016.

Michael L. Perlin, "Therapeutic Jurisprudence and Out Patient Commitment Law: Kendra's Law as Case Study", *Psychology, Public Policy and Law*, Vol. 9 (1), 2003.

Trevor Ryan, *et al.*, "Voting with 'Unsound Mind'? A Comparative Study of the Voting Rights of Person with Mental Disabilities", *UNSW Law Journal*, Vol. 39 (3), 2016.

World Health Organization, "the World Health Report 2001, Mental Health: New Understanding, New Hope", *World Health Organization*, 2001.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 5588).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara No. 5656).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 5678).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5898).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 6109).

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4271).
- Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No. 5871).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 185, Tambahan Lembaran Negara No. 5571).
- UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara No. 5246).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 818).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2015 No. 567).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil (Berita Negara Tahun 2016 No. 1354).

DOKUMEN HUKUM LAINNYA

European Court for Human Rights, Alajos Kiss v. Hungary, *Application No. 38832/06*, Council of Europe: European Court of Human Rights, 20 Mei 2010.

UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, 10 December 1948.

UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 16 Desember 1966.

UN General Assembly, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, 24 Januari 2007.

UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service*, 12 Juli 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.

UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination*, 10 November 1989.

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *General Comment No. 1, Article 12: Equal recognition before the law*, 19 Mei 2014, CRPD/C/GC/1.

INTERNET

Bivitri Susanti, “Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental”, <http://www.pshk.or.id/id/blog-id/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental/>, diakses 2 Januari 2018.

Kota Administrasi Jakarta Barat, “Penghuni Panti Laras Bisa Gunakan Hak Pilih Pilkada DKI”, <http://barat.jakarta.go.id/v12/?p=berita&id=767>, diakses 4 September 2017.

Detik News, “KPU Jakbar: Warga Binaan Gangguan Kejiwaan Bisa Ikut Nyoblos”, <https://news.detik.com/berita/d-3422343/kpu-jakbar-warga-binaan-gangguan-kejiwaan-bisa-ikut-nyoblos>, diakses 4 September 2017.

Detik News, “KPU Tegaskan Pemilih yang Sakit Jiwa Tetap Bisa Mencoblos”, <http://news.detik.com/berita/2546081/kpu-tegaskan-pemilih-yang-sakit-jiwa-tetap-bisa-mencoblos>, diakses 17 Agustus 2017.

Republika, “KPU Harus Perhatikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/24/p32c0f354-kpu-harus-perhatikan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental>, diakses 4 Februari 2018.

Sindo News, “Tim Anies-Sandi Minta Pasien Panti Bina Laras Tak Masuk DPT”, <https://metro.sindonews.com/read/1193545/171/tim-anies-sandi-minta-pasien-panti-bina-laras-tak-masuk-dpt-1491107479>, diakses 5 Mei 2017.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia “Indonesia Meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx>, diakses 17 Agustus 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “jiwa”, <http://kbbi.web.id/jiwa>, diakses 2 Februari 2018.



Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDGSJI), “Orang Dengan Gangguan Jiwa Berhak dan Mampu Memilih”, https://www.pdskji.org/article_det-33-orang-dengan-gangguan-jiwa-berhak-dan-mampu-memilih.html, diakses 2 Februari 2018.